

Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kabupaten Sidoarjo

Fitrotun Nuzula¹⁾, Kusnul Ciptanila Yuni K²⁾

¹Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

²Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

*Email korespondensi: fitrotunnuzula79@gmail.com

Abstract

Modernization of halal slaughterhouses as a new alternative from conventional slaughterhouses into modern professional halal slaughterhouses is a necessity for the people of Indonesia as a country with the largest Muslim population in Indonesia. It is clear that the modernization of halal slaughterhouses should be based on the existence of a slaughtering laboratory with adequate equipment or solutions to facilitate the slaughtering process, including qualified staff and monitoring and devaluation. all policies and regulations issued by the government. This research was conducted by using descriptive qualitative analytical method. The purpose of this study is to explain the importance of modernizing halal slaughterhouses for the realization of a green economy in Sidoarjo Regency. The results of the study indicate that butchers still use soil as a convenient place to make carcasses. The RPH, which is worth billions of rupiah, is just an incredibly beautiful building and the iron is rusty. This image shows that technology cannot be used to turn traditional practices into professionals. To achieve a green economy, there must be adequate facilities or human resources that can support the waste management of Krian RPH in all areas that can have economic, social and environmental value for a green environment.

Keywords: *Modernization, RPH, Green Economy*

Saran sitasi: Nuzula, F., & Yuni K, K. C. (2022). Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal RPH Krian dalam Mewujudkan *Green Economy* Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3100-3106. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6796>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sektor peternakan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu capaian sektor peternakan adalah memperoleh dari daging sumber protein yang kaya bagi manusia. Daging terdiri dari seluruh bagian jaringan hewan dan hasil olahannya yang dapat dimakan tetapi tidak menimbulkan efek samping negatif bagi yang memakannya (Subadyo 2017). Jenis daging yang paling populer di Indonesia adalah daging sapi.

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama satu dekade terakhir berkisar 1,49% per tahun. Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan daging sapi, dan masyarakat sebagai konsumen selalu ingin

mengonsumsi produk daging sapi yang berkualitas tinggi. Menurut peraturan pemerintah Indonesia, daging sapi yang baik adalah daging sapi yang memenuhi persyaratan ASUH, yaitu H aman, sehat, utuh dan halal. Daging sapi berkualitas tinggi berasal dari sapi yang sehat dan diproses dengan baik sebelum (ante-mortem) dan setelah dipotong (post-mortem).

Upaya memenuhi permintaan daging sapi berkualitas tinggi tidak selalu berjalan dengan baik. Penyebab utama rendahnya kualitas daging sapi adalah salah urus ternak (RPH). Kesalahan prosedural tersebut antara lain penanganan yang tidak tepat sebelum dan sesudah penyembelihan, kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Faktor-faktor tersebut menjadi ancaman bagi RPH, sehingga diperlukan konsep manajemen risiko. Tuntutan kondisi pasar di pasar global menghadirkan tantangan dan peluang

bagi RPH sebagai pemain kunci dalam upayanya untuk mendapatkan produk Daging Sapi dan Gandum Halal (ASUH) yang aman dan sehat. Atas dasar ini, faktor risiko harus diidentifikasi, faktor risiko dievaluasi dan faktor risiko dimitigasi di RPH (Sumatera dan Yuni 2012).

Masalah sampah diartikan sebagai sampah yang sudah tidak terpakai lagi (barang bekas) atau barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Dari sudut pandang ekonomi, sampah adalah sampah yang tidak berharga dan dari sudut pandang lingkungan, sampah adalah sampah yang tidak berguna yang menyebabkan banyak masalah pencemaran dan berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sampah dapat didefinisikan sebagai bahan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat digunakan, tidak menyenangkan, atau limbah, yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan bukan berasal dari dirinya sendiri (Padmono 2005). Pengelolaan sampah mutlak diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada. Apalagi di lingkungan saat ini, ketika pertumbuhan penduduk tumbuh pesat dan konsumsi masyarakat tinggi. Pengelolaan sampah paling baik dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah dalam membeli sarana dan prasarana (Sabir 2010).

Pembuangan limbah yang tepat dilakukan rata-rata di kota-kota besar. Hal ini terutama berbanding terbalik dengan kondisi yang berlaku di wilayah Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya masih pedesaan. Pengelolaan sampah di permukiman pedesaan terutama didasarkan pada model individu. Pengelolaan sampah dilakukan secara pribadi dengan cara dibakar, dikubur dan/atau diendapkan di aliran sungai atau sungai. Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di lingkungan Krian di Kabupaten Sidorjo.

Secara geografis Kabupaten Sidorjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 2.053.467 jiwa dan luas wilayah 714.243 km² dengan kepadatan 3.218,6 jiwa/km² yang terbagi dalam 18 kelurahan dan terdiri dari 353 kelurahan/desa. Kecamatan Krian didominasi oleh pemukiman pedesaan. Jenis tanaman ini menghasilkan banyak jenis limbah organik dari sebagian besar kegiatan pertanian dan peternakan.

Kabupaten Sidorjo merupakan sumber ternak sapi di Indonesia. Ada empat RPH di Kabupaten Sidorjo, yang menyembelih sekitar 160 ekor sapi per hari, semuanya di bawah naungan Dinas Peternakan Sidorjo. Daging yang dikirim oleh rumah potong

hewan harus berasal dari sapi yang dipotong sesuai dengan syariat Islam, bebas dari zat-zat yang menurunkan kualitas daging dan dalam keadaan baik. Kebutuhan untuk mendapatkan daging sapi berkualitas tinggi hingga distribusi produk daging di luar RPH diperlukan untuk mengidentifikasi risiko di RPH di Kabupaten Sidorjo ini. Hasil identifikasi risiko dapat memberikan informasi kepada pihak terkait untuk menjaga kualitas daging dan memenuhi persyaratan daging ASUH.

Penerapan pengelolaan sampah dengan standar individual yang terdapat di pedesaan Kabupaten Sidorjo memberikan dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan pencemaran sampai ke daerah lain, merusak sumber air tanah dan menghalangi aliran air dari sungai ke daerah sekitarnya, sehingga meningkatkan potensi bencana, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk mewujudkan pemerintahan Sidorjo dalam hal ekonomi hijau.

Dari uraian di atas maka perlu dikaji potensi yang dapat dimanfaatkan khususnya untuk sampah organik yang dihasilkan oleh kegiatan industri tahu, peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan kegiatan pasar sampah organik di kecamatan Krian. Pemerintahan Sidorjo. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka untuk peningkatan rumah potong hewan halal dan rencana implementasi yang dapat diterapkan pada rumah potong hewan yang ada berdasarkan kapasitas dan kapasitas berdasarkan volume produksi. Kerangka kerja ini seharusnya menjadi pedoman bagi penerapan HRP yang modern dan halal, baik dari segi pengelolaan maupun penerapan teknologi di Kecamatan Krian Kabupaten Sidorjo.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif, pengumpulan data melalui penelitian lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi narasumber/informan responden dan studi pustaka sesuai dengan fenomena penelitian. Data yang diperoleh dievaluasi menggunakan metode analisis deskriptif. Data untuk penelitian ini berupa kumpulan kata atau frase yang diperoleh dari wawancara atau desk research untuk sampai pada kesimpulan kualitatif dari penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan sumber terkait. Sumber data sekunder adalah literatur atau buku-buku yang sejalan dengan pembahasan penelitian ini, khususnya yang berkaitan

dengan pembahasan ekonomi hijau dan pengelolaan sampah.

Sebagai bagian dari studi lapangan ini, penulis melakukan studi di RPH Krian di Kabupaten Sidoarjo dan melihat perkembangan versus implementasi modernisasi rumah potong hewan halal, yang kemudian akan fokus pada manajemen dan distribusi sampah untuk menciptakan ekonomi hijau di kabupaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, dikembangkan gambaran umum proses komersial pemotongan hewan dan penyediaan daging untuk ruminansia besar di RPH Krian. Sumber ternak yang digunakan untuk penyembelihan dapat berasal dari peternakan swasta atau pakan asing. Ternak lokal yang dimiliki oleh petani kecil sangat bervariasi (negara, umur, hasil, spesies) dan tidak konsisten. Sebagian besar ternak yang dipelihara di peternakan tersedia untuk dijual selama festival Kurban, karena harga jualnya lebih kompetitif daripada rumah jagal konvensional untuk pasokan daging harian.

Sapi-sapi di peternakan yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging sehari-hari adalah sapi produktif dan sapi afkir. Ternak baik dijual di pasar ternak atau dibeli dari orang dalam sebelum memasuki peternakan. Sistem ini sangat buruk bagi peternak karena harga sapi ditentukan oleh tengkulak. Namun seperti halnya di Jawa Timur, masih terdapat sapi dari peternakan rakyat yang memenuhi kebutuhan daging sehari-hari, salah satunya di Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Saat ini, banyak rumah potong hewan beroperasi dengan berbagai cara, dari menyembelih sapi hingga melepaskan bangkai dari tanah, menghasilkan produk sampingan yang tidak sehat dan menular. Tradisi genosida yang kuat telah ada selama ratusan tahun dan, sejujurnya, tidak mudah diubah dalam jangka pendek. Di RPH Krian, Kabupaten Sidoarjo, Anda bisa menggunakan contoh untuk menggambarkan kebiasaan yang sulit diubah. RPH tidak digunakan di gedung yang indah dengan semua perlengkapan dan peralatan fungsional. Tukang daging masih menggunakan tanah sebagai tempat yang nyaman untuk menyembunyikan. Gambaran ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mengubah pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran modern (Barokah 2010).

Temuan lapangan di RPH Krian memberikan gambaran tentang pengelolaan RPH negara dan proses aplikasi yang dikelola oleh UPTD setempat dan BUMD setempat. Hasil kunjungan ini menunjukkan masih banyak aspek yang belum memenuhi standar atau norma penyembelihan halal modern. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kapasitas RPH untuk memenuhi perannya yang penting dalam produksi produk daging ASUH di bawah manajemen modern (Tantri, Setyawati, dan Khotimah 2013).

Hasil studi lapangan menunjukkan beberapa permasalahan teknis yang terjadi di RPH, seperti kurangnya pemeriksaan pre dan post mortem terhadap sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut dari Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo masih kurang. Kasus tersebut sejalan dengan perda provinsi yang tidak mengizinkan pemindahan agen pelayanan ke RPH Krian setelah pengambilalihan PERUMDA, sehingga semua tenaga pelayanan yang secara teknis bekerja dan bertanggung jawab atas RPH diangkat kembali di tempat kerja. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Rumah Potong Hewan (TPH) yang beroperasi bersama dengan RPH Tunas, TPH dan subdivisi TPH yang jauh secara geografis. Namun karena kekurangan dan kendala pemeriksaan sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, TPH tersebut saat ini tidak beroperasi dan akan menjadi rumah potong hewan babi.

Sekitar 100 sapi disembelih setiap hari di rumah jagal di Curion County. Pengukuran RPH timbulan sampah ini mengukur dua komposisi sampah: kandungan rumen sapi dan kandungan darah sapi. Saat mengukur kepadatan rumen pada sapi, isi rumen sapi dimasukkan ke dalam kantong yang disediakan dan ditimbang. Rata-rata total produksi rumen per ekor per hari adalah 3.539,98 kg/hari. Dari data di atas, rata-rata volume/berat darah per ekor adalah 6.553 kg dan rata-rata densitas darah per ekor adalah 1.494.355 kg/m³. Ingat bahwa volume darah yang diamati per sapi lebih rendah daripada tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya dan antara 15 dan 20 kg per sapi. Karena banyaknya darah sapi yang tercecer di lantai saat pengambilan, maka nilai rata-rata whole bovine blood yang dihasilkan oleh RPH Krian per hari adalah 754,65 kg. Pengelolaan limbah RPH Krian masih berlangsung dan sedang disesuaikan, oleh karena itu produksi produk yang bernilai ekonomis untuk dijual perlu disetujui untuk mewujudkan provinsi Sidoarjo berbasis ekonomi hijau. Berbagai

pemangku kepentingan yang terlibat dalam mencapai tujuan ini penting.

3.2. Pembahasan

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian bertanggung jawab untuk mengelola rumah potong hewan halal. 413 Tahun 1992 tentang Penyembelihan Hewan Untuk Disembelih Dan Penanganan Daging Serta Pemeliharaannya, Keputusan Kepala BPJPH n. 57 Tahun 2021 tentang Standar Sistem Jaminan Produk Halal, Standar Sistem Jaminan Halal 23103 RPH dan SNI 99003: 2018 tentang Penyembelihan Halal Hewan Ternak Ruminansia Terkait Sistem Jaminan Halal. Codex Alimentarius Commission (CAC 2004) mendefinisikan rumah potong hewan yang baik sebagai semua praktik di rumah pemotongan hewan yang berhubungan dengan kondisi dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian makanan pada semua tahap rantai makanan. Penerapan standar tersebut harus dilakukan untuk menjamin kehalalan proses produksi daging oleh RPH. Selain itu, sistem jaminan halal juga harus diterapkan, karena hal ini dipersyaratkan dalam permohonan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan (J. I. Lingkungan, Sriasih, dan Kisworo 2017).

Sistem pemantauan harus dimulai dengan pengumpulan ternak. Mengetahui keadaan kesehatan ternak, tergantung pada jenis pakan dan perlakuan yang dilakukan selama penanganan, memudahkan proses identifikasi. Ketertelusuran proses pertumbuhan diperlukan untuk menentukan pakan yang diberikan kepada ternak. Meski proses budidayanya tidak memerlukan sertifikasi Halal, namun pakan yang diberikan harus bebas dari babi dan kotoran (Antasari et al. 2019).

Ini sangat berguna ketika pabrik ingin mengeksport ke UEA. Sejumlah pemeriksaan pre dan post mortem serta prosedur penyembelihan merupakan bagian dari fungsi Veterinary Health Surveillance di RFH, sehingga keberadaan dokter hewan atau paramedis dan kari master menjadi penting. Selain itu, penjaga halal dan pengawas halal merupakan bagian penting dari rumah jagal halal. Alur proses pada gambar ditujukan untuk rumah potong hewan yang menghasilkan karkas panas. Untuk RPH yang memproduksi daging olahan atau beku, diperlukan tambahan sumber daya manusia (spesialis pemotongan daging topografi karkas) dengan pengalaman di jagal. Gambar 7 menunjukkan alur

proses penyembelihan ruminansia halal menurut SNI 99003:2018 terkait penyembelihan ruminansia halal.

Salah satu masalah terbesar yang terjadi di HRP Kryon adalah inefisiensi sistem manajemen karena budaya kerja atau mentalitas para pelaku komersial (tukang jagal) di HRP yang buruk.

Berdasarkan hasil pantauan kondisi RPH RPH Kriyan tersebut di atas, saat ini banyak RPH yang sudah memiliki fasilitas dan SDM yang memadai, namun beroperasi tanpa budaya kerja yang baik, seperti: B. Ketidaksiplinan. Kejam dan tidak jujur, perilaku ini pada akhirnya akan menghentikan rumah jagal untuk memproduksi daging yang tidak berbudaya (Desa et al. n.d.).

Perubahan budaya kerja RPH yang belum terdata harus segera dimulai. Perubahan perilaku tukang jagal harus dimulai dari komunitas pekebun mapan yang menjalankan usaha bersama secara profesional. Komunitas lulusan SPR yang tergabung dalam SASPRI (Solidaritas Alumni SPR Indonesia) adalah komunitas yang dapat Anda percaya untuk menjadi agen perubahan di industri pemotongan hewan. Komunitas petani SASPRI (pemasok ternak) bekerja sama dengan komunitas jagal (pemasok daging). Kedua komunitas ini harus saling bergantung secara profesional sebagai gantinya. Semuanya dilakukan secara transparan dan tunai dan dengan transportasi. Tidak ada hutang atau keterlambatan pembayaran. Praktek ini telah ada sejak masa lalu dan sebagian besar petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan (Sari, Wijaya, dan Wachid 2012).

RPH harus memiliki rumah potong hewan halal yang kompeten tidak hanya dalam kaitannya dengan hukum Islam tetapi juga dalam aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan agar dapat memenuhi semua persyaratan terkait pemotongan dengan baik. Selain itu, pengelola RPH harus memiliki pengawas halal yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses yang dilakukan di RPH sesuai dengan standar Sistem Jaminan Produk Halal.

Saat ini, prosedur teknis penyembelihan hewan, terutama di RPH dan TPH BUMN, masih sangat berbeda. SOP ada namun tidak secara khusus diterapkan di RPH dan TPH dan kegiatannya dilakukan oleh masing-masing tim jagal. Setiap Kelompok Tim Taktis memiliki prosedurnya sendiri, yang mungkin tidak sesuai dengan SOP yang ada. Saat ini, hanya beberapa RPH umum, seperti RPH Cibinong, yang menggunakan sistem koperasi. Dalam

sistem ini, tidak ada tim jagal yang bekerja sesuai prosedurnya masing-masing, melainkan tim rekanan yang bekerja sesuai SOP RPH.

Pemisahan area kotor dan bersih merupakan salah satu aspek terpenting dalam mendukung produksi produk daging yang higienis. Namun tidak jarang bangunan RPH/TPH eksisting kekurangan area bersih dan kotor. Biasanya bangunan RPH/TPH hanya berupa pelataran, dengan lantai beton terbuka, penerangan yang cukup dan air mancur yang berkualitas rendah. Tanpa pengelolaan sampah, jalan kita masih panjang dalam hal kebersihan. Karena pengulitan dan pemisahan daging dari karkas dilakukan di atas tanah (tidak tersuspensi), ada risiko kontaminasi yang tinggi. Sedikit RPH/TPH yang memahami konsep kamar bersih dan kotor. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena produk daging yang dihasilkan rentan terhadap kontaminasi dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia.

Selain itu, fasilitas produksi lemari es menghasilkan limbah cair dan padat di semua tahap proses yang memerlukan pembangunan fasilitas pengolahan limbah. Jeroan rumah potong hewan biasanya mengandung larutan darah, protein, lemak dan padatan tersuspensi sehingga menyebabkan tingginya tingkat pencemaran bahan organik yang dapat mencemari sungai dan badan air (T. Lingkungan 2006).

Untuk mengimplementasikan RPH (rumah potong hewan) saat ini menuju RPH halal modern, maka perlu mengkaji seluruh infrastruktur yang mendukung infrastruktur fisik infrastruktur organisasi.

Banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam perbaikan ini, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi, dan komunitas penyembelihan halal. Strategi modernisasi RPH halal yang efektif membutuhkan infrastruktur manajemen yang banyak dan jumlah aktor (pelaku) yang banyak dengan daftar prioritas.

Karya ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan mengutamakan strategi modernisasi rumah potong hewan halal. Analisis AHP didasarkan pada penilaian pemangku kepentingan. AHP memiliki 15 responden, termasuk perwakilan dari Departemen Pelayanan Kehidupan, pemilik RPH, YLKI (Yayasan Konsumen Indonesia), ilmuwan, ilmuwan. Responden diidentifikasi berdasarkan pemahaman mereka tentang kriteria peningkatan kualitas rumah potong hewan halal.

Hirarki kriteria Strategi Modernisasi Rumah Potong Hewan Halal dibagi menjadi empat tingkatan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10. Hirarki disusun dari atas ke bawah. Level tertinggi adalah pendekatan (level 4), diikuti oleh alternatif, aktor dan strategi (level 1). Nilai yang diberikan sesuai dengan skala penilaian Saaty (1993). Sarana geometris nilai komparatif untuk setiap responden diproses di Excel. Analisis ini memungkinkan untuk menginterpretasikan faktor dan prioritas pemangku kepentingan yang mempengaruhi strategi prioritas modernisasi RPH Halal (Level 4) (Rasminati dan Riyadi 2009). Usulan strategi alternatif, aktor dan faktor yang termasuk dalam analisis AHP berasal dari hasil diskusi kelompok terfokus dan tinjauan pustaka. Literatur referensi meliputi penelitian tentang strategi untuk mempromosikan sertifikasi serta penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi. Dari hasil penelitian dan literatur FGD, terlihat bahwa ada 5 alternatif strategi, aktor atau faktor: Pada Tier 1, strategi alternatifnya adalah: Sertifikasi halal untuk pengepakan daging dan pengecer; Revitalisasi RFH melalui pendanaan Syariah; Pelatihan Juleh (Halal Metzger) dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk RPH; pendampingan dan pelatihan; dan pendidikan konsumen. Level 2 adalah penanggung jawab DKPP (dinas perlindungan hewan dan pangan)/departemen; MUI (Majelis Ulama Indonesia); asuransi bank; lembaga pelatihan; dan RPH/Stowarzyscene. Tahap 3 merupakan faktor yang diperhitungkan dalam pelaksanaan modernisasi RPH halal, yaitu: kualitas sumber daya manusia di fasilitas RPH, pengurangan, pemantauan dan evaluasi staf RPH halal; Dan harga RPH halal yang kompetitif. Level 4 adalah Focus (goal/task), yaitu strategi yang lebih disukai berdasarkan nilai bobot yang diberikan oleh responden (Budiansyah et al. 2010).

Di tingkat rumah potong hewan, tidak hanya untuk penanganan hewan dari pemotongan hingga pengiriman ke pengecer, tetapi juga untuk ketertelusuran hewan hidup. Daging yang diperoleh dengan cara ini bisa dijamin kehalalannya. Faktor penentu kehalalan adalah faktor transportasi daging dari RPH ke pengecer/pasar. Sampai saat ini, sangat sedikit rumah jagal atau perusahaan dagang yang memiliki kendaraan khusus yang dirancang dan ditujukan khusus untuk pengangkutan daging. Demikian juga di ritel, jaminan halal dapat diberikan dengan menunjukkan sertifikat atau bukti asal daging. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kota

Malang, RPH akan memasang stiker di toko/kios penjual daging yang menginformasikan kepada konsumen bahwa daging yang dijual berasal dari RPH yang halal.

Ekonomi hijau memutuskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan degradasi lingkungan dengan mengembangkan produk baru, proses produksi, jasa dan gaya hidup. Singkatnya, ekonomi hijau mempromosikan produksi produk rendah karbon, termasuk pemrosesan dan distribusi, sekarang ekonomi hijau mencakup perubahan penggunaan air, keanekaragaman hayati, hutan, gaya hidup, pertanian, dan strategi untuk mengurangi emisi, termasuk strategi untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Dalam konteks konsep ekonomi hijau, terdapat penerapan yang efektif dari unsur-unsur dalam berbagai kebijakan, program atau kegiatan yang mengarah pada peningkatan atau pembangunan ekonomi, termasuk pertimbangan aspek penciptaan lapangan kerja yang baik dan pengurangan kemiskinan memicu ke lingkungan. Namun demikian, program dan langkah atau strategi yang diterapkan untuk mengakselerasi semangat ekonomi hijau selalu memiliki biaya dan manfaat sebagai akibat dari langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, suatu indikator yang merepresentasikan suatu nilai atau hubungan harus dapat menunjukkan apakah suatu kebijakan atau tindakan layak di masa depan.

Ekonomi hijau dibangun di atas tiga pilar. Pertama, dalam teori ekonomi hijau, pilar ekonomi merupakan ukuran penting yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan. Langkah ini dapat berupa nilai tambah dan manfaat ekonomi lainnya yang dapat menjadi pendorong keberlangsungan kegiatan mitra dalam setiap interaksinya. Penyaluran bantuan tidak hanya menyangkut pemerintah, swasta dan pendukungnya, pengunjung, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dan perlindungan lingkungan. Kedua, landasan sosial teori ekonomi hijau dalam konteks ini bukan hanya untuk mengidentifikasi aktor tetapi mengorganisasikannya untuk memaksimalkan manfaat bagi setiap aktor di RPH Krian Kabupaten Sidorjo. Ketiga, kolom ekologi (Environment), pilar fundamental ekologi, mengeksplorasi bagaimana perilaku manusia berhubungan dengan pengaruh lingkungan: 1) konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem kehidupan. 2) Investasi jangka panjang

dalam sumber daya alam. 3) Pelaksanaan program perlindungan lingkungan secara berkesinambungan. 4) Pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada penangkapan air. 5) Penggunaan udara segar 6) Pembuangan limbah yang tepat dan benar.

4. KESIMPULAN

Transisi dari RPH konvensional tradisional ke RPH Halal profesional modern merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Perilaku masyarakat jagal yang melakukan serangkaian proses penyembelihan sapi untuk menghasilkan karkas di tanah, seharusnya tidak lagi diperbolehkan di Indonesia, bahkan oleh tradisi agama. Ini jauh dari praktik perilaku murni yang diajarkan dalam Islam. Slogan bersih adalah bagian dari keyakinan yang belum mengakar di masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Kuatnya tradisi penyembelihan di lapangan yang sudah berlangsung ratusan tahun, tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Sebuah contoh dapat diberikan di RPH Kabupaten Kediri untuk menggambarkan sebuah kebiasaan yang sulit diubah. RPH dengan semua fasilitas dan semua utilitas yang berfungsi dengan baik di gedung yang indah belum digunakan. Tukang daging masih menggunakan tanah sebagai tempat yang nyaman untuk membuat bangkai. RPH senilai miliaran rupiah hanyalah sebuah bangunan yang luar biasa indah dan besinya berkarat. Gambar ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat digunakan untuk mengubah praktik tradisional menjadi profesional. Untuk mencapai ekonomi hijau, harus ada fasilitas atau sumber daya manusia yang memadai yang dapat mengambil alih pengelolaan limbah RPH Krian di semua wilayah yang dapat memiliki nilai ekonomi, sosial dan lingkungan untuk lingkungan yang hijau.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak Kopontren yang telah memberikan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

Wungkus, A. (2019). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (2): 80–88.

- Budiansyah, A et al. (2010). Isolasi dan Karakterisasi Enzim Karbohidrase Cairan Rumen Sapi Asal Rumah Potong Hewan. *Jurnal Media Perternakan*, 33(1): 36-43.
- Sriasih, M. dan Kisworo, D. (2017). Studi Pendahuluan Cemarkan Air Limbah Rumah Potong Hewan di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu*, 15(1): 42-48.
- Idaman, N. Yudo, S. (2006). Rancang Bangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) Ayam Dengan Proses Biofilter. *Jurnal JIA*, 2 (1): 83-91.
- Padmono, Djoko. (2005). Alternatif Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan-Cakung. *J. Tek. Ling. P3TL.-BPPT*. 6. (1): 303-310.
- Rasminati, N, dan S Utomo D A Riyadi. (2009). Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sains Peternakan* Vol. 7 (1), Maret 2009:(1): 20-24.
- Sabir, Salsa. (2015). Gambaran Rumah Potong Hewan / Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah Discription of Slaughterh. *Jurnal Vektor Penyakit*, Vol. 9 No. 2, : 45-52.
- Sari, A M. Andy F W. dan Abdul W. (2012). Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa Puten Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No.4, Hal. 765-770
- Subadyo, A Tutut. (2017). Pengelolaan Dampak Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Di Kota Batu. *Jurnal ABDIMAS Unmer Malang*, Vol. 2, Nomor 2: 15-20.
- Khasrad. Hellyward, J. Yuni, A D. (2012). Kondisi Tempat Pemotongan Hewan Bandar Buat Sebagai Penyangga Rumah Pemotongan Hewan (Rph) Kota Padang. *Jurnal Perternakan Indonesia*, 14 (2): 373-78.
- Tantri, N. Setyawati, T R, dan Khotimah, S. (2013). Prevalensi dan Intensitas Telur Cacing Parasit pada Feses Sapi (Bos Sp .) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Protobiont*, Vol 2 (2): 102 - 106.